

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang merdeka dan berdaulat, dan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) . Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem pemerintahan inilah Pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau propinsi-propinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah.

Dimana hal tersebut dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Disamping itu, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menentukan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Jimly Asshiddiqie, 2010: 240-241)

Dengan adanya potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Atas dasar Pemerintahan Daerah ini, maka muncullah sistem otonomi daerah yang dikenal dengan Sistem Desentralisasi. Dimana yang dimaksud dengan Sistem Desentralisasi ialah memberikan atau penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut, dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan daerah.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 33 propinsi, dan salah satu dari propinsi tersebut adalah Propinsi Riau. Propinsi Riau saat ini merupakan propinsi yang sangat berkembang di setiap sektornya, baik sektor perindustrian, perekonomian, pariwisata, pendidikan dan terutama saat ini adalah pembangunan.

Pendukung kemajuan Propinsi Riau adalah dengan menyerahkan pengelolaan daerah-daerah Propinsi Riau kepada setiap pemerintahan di Kota ataupun Kabupaten, khususnya Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan, merupakan Kota yang sangat berkembang terutama dalam pembangunan. Seperti, pembangunan gedung-gedung perkantoran, pemukiman masyarakat (perumahan), ruko-ruko (rumah toko), pasar, dan lain sebagainya. Sehingga dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan yang terus terjadi mengakibatkan berkurangnya lahan hijau yang merupakan bagian dari lingkungan hidup, yang mesti dijaga. Lingkungan hidup itu amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia bagi kebudayaan dan peradabannya.

Dengan menyadari hal tersebut maka setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan yang tepat sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif.

Pertumbuhan pembangunan di Kota Pekanbaru sedang berkembang, hal ini dapat terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di Kota Pekanbaru. Di satu sisi hal tersebut memberikan dampak positif yang berarti Pekanbaru mengalami pembangunan infrastruktur yang berkembang dengan pesat. Pembangunan infrastruktur di Pekanbaru seharusnya dapat menimbulkan efek positif yang besar bagi masyarakat infrastruktur ini benar-benar sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, namun hal ini berbeda hasilnya atau dampaknya jika pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu mengenai keseimbangan lingkungan.

Hal ini terlihat dari semakin sempitnya ruang untuk resapan air. Dengan tidak adanya ruang untuk resapan air maka saat ini terjadilah beberapa titik genangan air. Baik itu berbentuk kecil maupun besar genangan-genangan air ini kemudian jika tidak diatasi maka akan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Salah satu bentuk dampak yang ditimbulkan akibat dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya keseimbangan pembangunan sektor perkantoran dan perumahan di Kota Pekanbaru adalah yang tidak memfasilitasi bangunan-bangunan tersebut dengan sumur resapan dan drainase yang baik.

Sehingga ketika musim hujan datang, Kota Pekanbaru akan mengalami banjir terutama di jalan-jalan utama yang terdapat kompleks pertokoan ataupun perumahan, salah satu contohnya adalah di Jalan H.R Soebrantas yang terdapat di Kecamatan Tampan. Banjir ini menjadikan salah satu penghambat masyarakat dalam menjalankan aktifitas karena dengan terjadinya banjir maka sistem transportasi sepanjang jalan yang digenangi air banjir akan mengalami kemacetan.

Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut maka salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Pekanbaru adalah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Sumur resapan yakni sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke tanah. Alasan penting kenapa sumur resapan dibutuhkan dalam setiap bangunan yang berdiri ialah sumur resapan merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya banjir ketika musim penghujan sudah mulai datang.

Karena setiap bangunan yang berdiri telah menutupi tanah dan resapan air maka tidak ada lagi yang menjadi resapan air. Untuk itulah bangunan yang berdiri diwajibkan membuat sumur resapan seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 pasal 18 ayat 1. Karena tujuan dari pembuatan sumur resapan ini adalah agar ketika hujan datang sebagian besar



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

volume air hujan yang jatuh tertampung di dalam sumur resapan, dan tentunya apabila setiap rumah ataupun bangunan sudah memilikinya maka volume air yang mengalir di atas permukaan tanah akan berkurang dengan air secara otomatis juga akan berkurang.

Di Kota Pekanbaru terdapat 12 kecamatan, dan Kecamatan Tampan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak, yaitu 188.806 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka akan sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kecamatan Tampan dan seharusnya diimbangi dengan pembangunan sumur resapan. Karena dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 pasal 18 setiap bangunan yang berdiri wajib membuat sumur resapan.

Namun peneliti menemukan di beberapa perumahan yang terdapat di Kecamatan Tampan tidak dilengkapi dengan sumur resapan. Oleh karena itu peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tampan. Dapat dilihat dari banyak bangunan yang berdiri di Pekanbaru hanya sedikit yang memiliki sumur resapan dan bahkan masih banyak pula bangunan besar dan ruko-ruko yang belum memiliki sumur resapan. Berikut adalah data sumur resapan per-kelurahan di Kecamatan Tampan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1. Jumlah Sumur Resapan di Setiap Kelurahan yang Terdapat di Kecamatan Tampan**

No	Kelurahan	Jumlah Bangunan Yang Memiliki Sumur Resapan	Jumlah Bangunan Yang Tidak Memiliki Sumur Resapan	Jumlah Bangun di Setiap Kelurahan, Kecamatan Tampan
1	Sidomulyo Barat	120	115	235
2	Delima	164	146	300
3	Simpang Baru	185	207	392
4	Tuah Karya	107	112	119
	Jumlah	576	580	1046

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Riau, 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa: “Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang telah ditetapkan Pemerintah Kota”.

Artinya apabila lokasi dari bangunan yang berdiri tersebut tidak memungkinkan dalam melakukan pembuatan sumur resapan, maka Pemerintah Kota akan menentukan lokasi pengganti, akan tetapi dalam praktiknya Pemerintah Kota Pekanbaru tidak pernah menentukan tempat pengganti tersebut dan bahkan tempat pengganti tersebut tidak ada.

Kemudian pada pasal 19 ayat 2 dikatakan bahwa: “Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin bangunan” Artinya setiap badan ataupun perseorangan yang ingin mendirikan bangunan wajib

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikutsertakan rencanapembuatan sumur resapan akan tetapdalam praktiknya banyak bangunan yang sudah berdiri dan belum memiliki sumurresapan. Kemudian pada ayat 4diakatakan bahwa : “Setiap bangunan yang sudah berdiri dan belum memiliki sumurresapan wajib membuat sumur resapansusulan”. Akan tetapi masih banyakbangunan yang telah berdiri sebelumberlakunya Perda ini sampai saat ini belummembuat sumur resapan susulan hal inidisebabkan oleh kurangnya sosialisasiPemerintah Kota yang diwakili oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru.

Jadi, dapat dipahami bahwa setiap bangunan yang berdiri, sebelum ataupun sesudah Perda ini diberlakukan wajib dilengkapi sumur resapan, namun faktanya dari hasil pengamatan sementara dilapangan dari begitu banyaknya bangunan yang berdiri, banyak dijumpai bangunan yang tidak dilengkapi dengan sumur resapan, air hujan yang turun dan tertampung pada bangunan langsung dialiri melalui talang air ke dalam parit-parit, dan air yang tertahan dan menggenangi permukaan lahan yang disemenisasi dibiarkan mengalir ke badan jalan, padahal seharusnya air hujan tersebut dialiri ke sumur resapan.

Adapun aturan mengenai ukuran (volume) sumur resapan minimal yang diwajibkan untuk dibuat sesuai luas permukaan tanah yang ditutup oleh luas permukaan bangunan adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.2. Luas Permukaan Tanah Yang Ditutup dan Wajib Membuat Sumur Resapan**

No	Luas Permukaan Yang Tertutup (m2)	Volume (m3)
1	<36	1
2	-13	2
3	51-99	4
4	100-149	6
5	150-199	8
6	200-299	12
7	300-399	16
8	400-499	20
9	500-599	24
10	600-699	28
11	700-799	32
12	800-899	36
13	900-999	40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Riau, 2016

Berdasarkan aturan tersebut dapat dipahami bahwa, untuk luas bangunan yang menutup permukaan tanah dengan luas kecil dari 36 m<sup>2</sup> (6 M x 6 M) wajib membuat sumur resapan. Di Pekanbaru permasalahan lingkungan seperti genangan air dan banjir sudah cukup lama terjadi, apalagi melihat kondisi pembangunan yang tidak dapat dibatasi, khususnya di daerah RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan saat ini sedang maraknya pembangunan yang merupakan daerah yang menjadi langganan banjir akibat pembangunan dan menutupi permukaan tanah tanpa disertai pembuatan sumur resapan sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajiban yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Selanjutnya dalam Pasal 20 Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 menjelaskan:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pada kawasan publik kota seperti jalan umum, kawasan umum, fasilitas umum, kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru yang menangani pengembangan sumber daya air Kota Pekanbaru harus membuat sumur resapan pada titik-titik genangan air untuk mencegah Banjir di musim hujan dan mengkonservasi air tanah”.

Ada aturan baku yang sudah dibuat pemerintah, seperti peraturan daerah, Perda tentang sumur resapan dan sejumlah aturan lain dalam membuka kawasan baru untuk pembangunan pemukiman. Padahal, fungsi sumur resapan ini selain meminimalisir jumlah genangan air dan banjir, juga dapat berfungsi sebagai air cadangan di rumah bila terjadi musim kemarau .

Aturan-aturan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal apabila hanya dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada pengawasan dan pengecekan langsung oleh pemerintah yakni lembaga yang terkait, dan didukung dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang menyeluruh, sehingga tujuan yang diinginkan oleh Peraturan Daerah tersebut tercapai, tidak seperti apa yang terlihat dan terjadi saat sekarang ini. Jika saja ini dilaksanakan dan diikuti dengan baik dari seluruh pihak pemerintah dan masyarakat pemilik bangunan, maka pembangunan yang begitu pesat ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada efek negatif

Tata Kota mensosialisasikan Perda ini dan manfaat sumur resapan. Pada pasal 29 dikatakan “Setiap orang, badan hukum dan pemohon izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya 50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juta rupiah” akan tetapi pada kenyataannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru tidak tegas dalam memberikan sanksi. Hal ini terbukti dengan tidak pernah adanya sanksi yang diberikan kepada pihak pelanggar.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan terindikasi beberapa fenomena permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terindikasi bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih sedikit sekali bangunan yang membuat sumur resapan dari ribuan jumlah bangunan yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan hanya 162 pemilik bangunan yang membuat sumur resapan. Sedangkan jumlah bangunan yang ada di wilayah Kecamatan Tampan adalah sebanyak 5.981 unit (BPS. Tampan dalam Angka 2015).
2. Terindikasi bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan, masih belum efisien, Aturan-aturan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal apabila hanya dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada pengawasan dan pengecekan langsung oleh pemerintah yakni lembaga yang terkait, dan didukung dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang menyeluruh, sehingga tujuan yang diinginkan oleh Peraturan Daerah tersebut tercapai, tidak seperti apa yang terlihat dan terjadi saat sekarang ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru belum bisa memaksimalkan pengelolaannya dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, penulis merumuskan permasalahan penelitian menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru?
2. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui permasalahan dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru.

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang diantaranya adalah:

1. Melalui penelitian Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan sebuah kebijakan, terutama Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru.
2. ini diharapkan bisa memberikan gambaran umum tentang kondisi pelaksanaan sebuah kebijakan, terutama pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru.
3. Kepada instansi terkait, dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu bahan evaluasi dalam penetapan kebijakan mengenai Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru.

4. Kepada peneliti selanjutnya bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru.

### 1.1. MANFAAT PENULISAN

1. Sebagai penambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama di bangku perkuliahan untuk di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sebagai distribusi untuk perpustakaan dan bahan acuan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama di lain kesempatan.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi terkait yaitu dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kota Pekanbaru Provinsi Riau mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru No.10 Tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan.

### 1.2. SISTEMATIKA PENULISAN.

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini di bagi atas enam pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dalam sub bab sebagai berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pembuka dari penulisan skripsi ini, yang antara lain berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori yang melandasi penulisan, pandangan islam tentang konsep penelitian, kerangka berfikir, konsep operasional dan penelitian terdahulu.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum kota Pekanbaru, gambaran umum dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota pekanbaru, struktur organisasi, visi misi dan tujuan hingga uraian tugas pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian, bab evaluasi terhadap hasil penelitian.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang di peroleh dari bab-bab sebelumnya.